

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moral merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang digunakan untuk menentukan benar atau salah serta baik atau buruk dalam kehidupan masyarakat.¹ Dalam konteks politik di Indonesia, fenomena perilaku politik dalam meraih kekuasaan sering kali menunjukkan kecenderungan mengabaikan nilai moral, di mana sebagian politisi lebih berorientasi pada kemenangan politik tanpa mempertimbangkan aspek etika dari tindakan yang dilakukan. Gejala tersebut muncul ketika etika politik tidak lagi ditempatkan sebagai landasan utama dalam praktik politik. Akibatnya, sebagian politisi lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dibandingkan penerapan nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan politik. Pada dasarnya, politik dipandang sebagai ruang yang seharusnya diisi oleh individu-individu yang memiliki integritas dan orientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, ketika dihadapkan pada dilema politik, sebagian politisi mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas antara kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut tampak dalam proses pemilihan umum, ketika para calon elite politik sering menyampaikan berbagai janji politik atas nama kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. Akan tetapi, setelah pemilihan umum berlangsung, realisasi dari janji-janji tersebut kerap tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya.²

Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan manipulatif dalam praktik politik, di mana masyarakat dijadikan objek untuk memperoleh dukungan politik demi kepentingan pribadi maupun penguatan posisi partai. Dalam upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sebagian politisi juga menggunakan berbagai strategi yang bertentangan dengan nilai moral dan etika

¹ Kartika Rinakit Adhe, "Guru Pembentuk Anak Berkualitas," *Care* 03, no. 3 (2016): 42–52. Hal, 43.

² Moh. Muchtarom, "Fenomena Pemilu, Etika Politik Dan Nilai Moral Kekuasaan," *Pkn Progresif* 7, no. 1 (2012): 45–53. Hal, 46.

politik, seperti politik uang (*money politics*), kampanye hitam, penyebaran hoaks, manipulasi politik, dan berbagai bentuk praktik pragmatis lainnya. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik dari yang semestinya berlandaskan nilai moral menuju politik yang lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan.³

Secara etimologis, moral berasal dari kata *mos* yang berarti kebiasaan, tata cara, atau adat-istiadat dalam berperilaku. Secara linguistik, moral berkaitan dengan konsep mengenai benar dan salah, baik dan buruk, serta sesuatu yang dianggap patut untuk dilakukan. Moral menjadi dasar bagi individu dalam mengembangkan perilaku dan kehidupannya di tengah masyarakat. Dengan adanya moral, individu memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, moral memiliki posisi yang penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan sosial. Namun demikian, persoalan moral senantiasa menjadi perhatian dalam kehidupan manusia, baik pada masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hal ini disebabkan karena kerusakan moral individu tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi ketenteraman dan keteraturan sosial. Apabila kerusakan moral terjadi secara luas dalam suatu masyarakat, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk dalam praktik politik. Dengan demikian, persoalan moral dalam dunia politik menjadi isu yang penting untuk dikaji, terutama dalam memahami perilaku politisi dalam menghadapi tuntutan kekuasaan dan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi.⁴

Proses pembentukan perilaku moral menurut William M. Kurtines dan Jacob L. Gewirtz terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) menganalisis situasi untuk memahami masalah dan melihat tindakan yang dapat dilakukan; (2) menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral; (3) memilih tindakan yang dianggap paling benar berdasarkan pertimbangan moral; dan (4) melaksanakan

³ Muchtarom. Hal, 47.

⁴ Rubini, "Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam," *Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 225–71. Hal, 228.

tindakan sesuai dengan nilai moral yang diyakini. Dengan demikian, perilaku moral tidak hanya berkaitan dengan pemahaman tentang benar dan salah, tetapi juga proses pengambilan keputusan dan penerapan nilai moral dalam tindakan. Sementara itu, Jean Piaget menjelaskan bahwa moral merupakan kebiasaan individu dalam berperilaku, baik positif maupun negatif, terutama dalam menghadapi persoalan sosial yang berkaitan dengan tindakan moral. Menurut Piaget, perkembangan moral terbentuk melalui interaksi sosial dan perkembangan cara berpikir individu dalam memahami aturan, tanggung jawab, serta konsekuensi dari suatu tindakan.⁵

Menurut Thomas Hobbes, moral merupakan perilaku manusia yang terbentuk melalui penyesuaian diri terhadap norma dan aturan sosial agar tercipta keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hobbes, manusia perlu menaati aturan untuk menghindari konflik, pertentangan, dan kekacauan sosial. Oleh karena itu, individu menyesuaikan perilakunya dengan nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat maupun kelompok sosial tempat ia berada. Namun, dalam praktik politik, khususnya pada saat pemilihan umum, sebagian politisi masih melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *homo homini lupus* dari Thomas Hobbes, yang berarti “manusia adalah serigala bagi manusia lainnya”. Konsep tersebut menggambarkan bahwa dalam kondisi tertentu manusia dapat saling bersaing secara keras demi kepentingan pribadi, termasuk dalam perebutan kekuasaan politik. Dalam situasi persaingan politik, sebagian politisi menganggap bahwa kemenangan harus dicapai dengan berbagai cara, meskipun bertentangan dengan nilai moral dan aturan yang berlaku.⁶

Akibatnya, praktik politik yang tidak bermoral dapat menimbulkan kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, agama, ekonomi, dan politik. Selain itu, perilaku tersebut juga dapat merusak sistem sosial dan aturan yang telah dibangun dalam masyarakat. Keinginan yang kuat untuk

⁵ Nur Azizah, “Perilaku Moral Dan Religiusitas Siswa Berlatar Belakang Pendidikan Umum Dan Agama,” *Psikologi* 33, no. 2 (2006): 1–16. Hal,3.

⁶ Abdul Wahid, “Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi Di Indonesia,” *Etika Dan Pemilu* 2, no. 3 (2016). Hal, 13

memperoleh dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan pribadi dapat menyebabkan menurunnya nilai adab dan moral manusia. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya berbagai tindakan menyimpang yang dapat menimbulkan ancaman serius dalam kehidupan sosial. Demi mencapai kekuasaan, sebagian individu melakukan kecurangan secara tersembunyi dengan mengabaikan nilai-nilai moral. Kecurangan merupakan perilaku yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara-cara yang melanggar aturan atau standar yang telah ditetapkan, baik secara individu maupun kelompok. Pada dasarnya, setiap individu memiliki standar moral yang menjadi pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan nilai moral yang dianut agar terdapat kesesuaian antara prinsip moral dan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Fleksibilitas moral adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menyesuaikan penerapan nilai moral sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu tanpa meninggalkan prinsip dasar yang diyakini. Artinya, seseorang tidak bersikap terlalu kaku dalam menerapkan nilai moral, tetapi tetap memiliki batas dan pedoman etika dalam bertindak. Fleksibilitas moral muncul ketika individu menghadapi kondisi yang menuntut penyesuaian antara nilai moral dengan kebutuhan sosial, politik, budaya, atau kepentingan tertentu. Dalam kajian etika, fleksibilitas moral berada di antara dua pandangan, yaitu moral absolut dan moral relativis. Moral absolut memandang bahwa nilai moral bersifat tetap dan tidak boleh berubah dalam keadaan apa pun. Sebaliknya, moral relativis memandang bahwa nilai moral bergantung pada situasi dan kondisi sosial tertentu. Fleksibilitas moral berada di tengah kedua pandangan tersebut, yaitu tetap mempertahankan prinsip moral, tetapi penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks yang dihadapi.⁸

⁷ Hamdi Muluk Qisthina Aulia, "Ingatan Tentang Kematian Menurunkan Kemunafikan Penguasa: Efek Kekuasaan Dan Ancaman Kematian Terhadap Kemunafikan Moral," *Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 4, no. 1 (2015): 72–87. Hal,73.

⁸ Teguh Suharto, *Pengantar Teori Belajar Pembelajaran Bahasa Berbasis Karakter Dan Siklus Pengalaman*, ed. Dedy Richi Rizaldy, Cetakan 1 (Madiun: Unipma Press, 2022). Hal,83.

Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami situasi, mempertimbangkan konsekuensi tindakan, dan mengambil keputusan moral. Dalam hal ini, fleksibilitas moral terlihat ketika seseorang menyesuaikan tindakannya terhadap keadaan tertentu tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai moral yang diyakini. Dengan demikian, fleksibilitas moral bukan berarti menghilangkan moralitas, tetapi merupakan bentuk penyesuaian moral terhadap realitas sosial yang dihadapi. Individu yang memiliki fleksibilitas moral biasanya mampu menghadapi perubahan dan tekanan sosial, menyesuaikan sikap dan strategi sesuai keadaan, serta memiliki cara pandang yang lebih luwes dalam memahami persoalan sosial. Dalam dunia politik, fleksibilitas moral terlihat ketika politisi menyesuaikan keputusan dan strategi politik dengan situasi yang dihadapi, tetapi tetap mempertimbangkan nilai moral dalam tindakannya.⁹

Abdurrahman Wahid, sebagai pemikir Islam, menjelaskan bahwa Islam hadir untuk melindungi kepentingan seluruh umat manusia serta menjaga keragaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam bukan sistem ketatanegaraan yang baku, tetapi sumber nilai-nilai etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada masa perubahan politik pasca-reformasi. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Pemikiran Abdurrahman Wahid juga menawarkan pendekatan reformasi Islam yang bersifat etis dan substantif dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan membangun negara yang menghargai nilai-nilai Islam sekaligus menjaga kekayaan intelektual dan budaya pesantren.¹⁰

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa cita-cita negara Indonesia harus didasarkan pada komitmen politik nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis sesuai dengan prinsip kemerdekaan. Oleh karena itu, demokrasi dan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi menjadi hal yang penting. Dalam pandangannya, hak-hak warga negara merupakan dasar utama

⁹ Suharto. Hal,84.

¹⁰ Yusdania, "Gagasan Politik Gus Dur Dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi," *Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 165–74. Hal,168.

dalam demokrasi dan pembentukan hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, Abdurrahman Wahid sering mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap kelompok minoritas. Ia juga menolak tindakan kelompok mayoritas yang dapat menindas atau melanggar hak kelompok lain. Selain itu, Abdurrahman Wahid memberikan perhatian terhadap perubahan politik pasca-reformasi, baik dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan, maupun perkembangan globalisasi yang berlangsung cepat.¹¹

Kelompok yang meyakini bahwa moral dan politik dapat disatukan memiliki pandangan *high politics*, yaitu pandangan bahwa agama dalam politik dapat membentuk perilaku politik yang sesuai dengan nilai moral. Salah satu tokoh yang menjelaskan pandangan ini adalah Amien Rais melalui konsep politik berkualitas tinggi (*high politics*). Amien Rais memandang politik sebagai sesuatu yang luhur (*adiluhung*) dan memiliki nilai moral serta etika. Menurut Amien Rais, politik *adiluhung* memiliki tiga prinsip utama. Pertama, pemimpin politik harus memegang amanah, menepati janji, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kedua, jabatan politik harus dapat dipertanggungjawabkan karena setiap pemimpin memiliki tanggung jawab moral sebagaimana ajaran Rasulullah. Ketiga, kegiatan politik harus didasarkan pada prinsip ukhuwah, yaitu memandang semua manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan etnis, agama, ras, keturunan, dan latar belakang sosial.¹²

Pemikiran Amien Rais tentang hubungan Islam dan politik menunjukkan bahwa nilai agama penting dalam kehidupan bernegara. Ia menekankan ajaran tauhid sebagai dasar kepemimpinan dan penyelenggaraan negara. Melalui pemikiran tersebut, pemimpin diharapkan menjadikan moral dan keadilan sebagai pedoman dalam kebijakan politik, sehingga pemerintahan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Teori politik *adiluhung* yang dikemukakan oleh Amien Rais awalnya diterapkan dalam Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, perbedaan ideologi dan arah politik di dalam partai membuat pengaruh Amien Rais semakin berkurang dan mendorong

¹¹ Yusdania. Hal,171.

¹² Auri Adam, "Height Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah," 1999.Hal, 44

lahirnya Partai Ummat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Amien Rais tampil lebih menonjolkan nilai-nilai keagamaan dalam politik. Ketidaksesuaian antara ideologi PAN dan pandangan Amien Rais menunjukkan bahwa penerapan politik adiluhung tidak mudah dilakukan dalam praktik politik. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara agama dan politik masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia.¹³

Salah satu tokoh yang menentang moral tradisional adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900). Friedrich Wilhelm Nietzsche menolak moral yang didasarkan pada otoritas agama dan Tuhan. Menurut Nietzsche, jika Tuhan dan kekuatan supranatural dihilangkan dari pemikiran manusia, maka dasar moral tradisional juga akan runtuh. Ia juga menolak pandangan yang mengaitkan moral dengan pengorbanan diri, suara hati, pahala, dan dosa. Menurut Friedrich Wilhelm Nietzsche, pandangan moral seperti itu dapat melemahkan manusia dan membatasi kebebasan berpikir. Oleh karena itu, moral seharusnya diarahkan pada pengembangan diri, menjaga martabat, memperhatikan kepentingan diri sendiri, serta mendorong individu untuk menjadi lebih unggul dalam kehidupannya. Friedrich Wilhelm Nietzsche menjelaskan bahwa tindakan manusia didorong oleh “kehendak untuk berkuasa” (*will to power*), yaitu keinginan individu untuk menjadi lebih kuat dan unggul. Dalam pandangannya, manusia tidak seharusnya terikat pada aturan mutlak dari otoritas karena setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan nilai dan tindakannya sendiri, meskipun terkadang mengabaikan kepentingan masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, aliran egoisme menempatkan individu sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas perkembangan dirinya sendiri. Teori ini menolak moral sosial karena dianggap sebagai “moralitas hamba”, sedangkan manusia seharusnya tidak hidup sebagai hamba dari nilai-nilai yang membatasi kebebasannya.¹⁴

Niccolo Machiavelli menolak penggunaan moral ideal sebagai dasar utama dalam politik. Menurut Niccolo Machiavelli, politik memiliki realitas yang berbeda dengan kehidupan pribadi. Seorang penguasa sering menghadapi situasi

¹³ Adam. Hal,45.

¹⁴ A Maiwan, “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan,” *Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018): 193–215. Hal,205.

yang keras, penuh intrik, pengkhianatan, dan ancaman. Dalam kondisi seperti itu, jika penguasa terlalu berpegang pada nilai seperti kejujuran mutlak, kasih sayang tanpa batas, dan larangan kekerasan, maka kekuasaan dan stabilitas negara dapat terancam. Niccolo Machiavelli menjelaskan bahwa seorang penguasa terkadang perlu bertindak keras demi menjaga keamanan, persatuan, dan kestabilan negara. Penguasa yang dianggap kejam belum tentu buruk apabila tindakannya mampu menjaga negara tetap aman. Sebaliknya, penguasa yang terlalu lunak dapat menyebabkan kekacauan dan kehancuran negara. Oleh karena itu, menurut Machiavelli, tindakan politik harus dilihat dari hasilnya bagi negara.¹⁵

Ada tiga pokok pemikiran Niccolo Machiavelli tentang penolakan moral dalam politik. Pertama, ia menolak moral absolut dalam politik karena tindakan politik dinilai dari dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas negara, bukan hanya dari ukuran baik atau buruk. Kedua, Machiavelli memisahkan etika pribadi dan etika politik. Dalam kehidupan pribadi seseorang dapat bersikap jujur dan penyayang, tetapi dalam politik seorang penguasa harus siap bertindak tegas sesuai keadaan. Ketiga, Machiavelli lebih menekankan efektivitas daripada kesalehan moral. Tindakan yang secara moral dianggap buruk dapat dibenarkan secara politik apabila mampu menjaga negara dari kekacauan. Oleh karena itu, pemikiran Niccolo Machiavelli dikenal sebagai bentuk realisme politik.¹⁶

Di Indonesia, tindakan yang menyimpang dari nilai ideal, khususnya dalam etika dan moral politik, masih sering terjadi. Fenomena ini semakin terlihat saat pemilihan umum berlangsung. Berbagai penelitian menunjukkan adanya praktik politik yang tidak ideal, seperti politik uang yang masih marak terjadi dan memengaruhi pilihan politik masyarakat.¹⁷ Kasus lain yang sering terjadi adalah korupsi politik, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004–2022 menunjukkan bahwa

¹⁵ Niccolo Machiavelli, *II Principe*, ed. L. Passerine and G. Milanesi, edition 6 (Florence: Le Opere, 1891). Hal, 67-68.

¹⁶ Mukhtar, "Penguasa Dan Kekuasaan Dalam Pandangan Komunikasi Politik Machiavelli," *Komunikologi* 2, no. 1 (2018): 56–76. Hal, 64.

¹⁷ Hardianto Hawing and Nursaleh Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)," *Journal of Social Politics and Governance* 3, no. 1 (2021): Hal 29.

pelaku korupsi berasal dari kalangan elite politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, dengan jumlah mencapai 521 orang.¹⁸

Pelanggaran etika juga terjadi di lembaga legislatif. Beberapa kasus melibatkan Setya Novanto dan Ade Komarudin dari Partai Golkar, serta Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI. Selain itu, terdapat pelanggaran etika lain, seperti bermain game saat sidang, tidur dalam rapat, menonton konten pornografi, bertengkar, membolos, dan melakukan absensi titipan. Dalam partai berbasis Islam, beberapa kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga pernah terlibat kasus korupsi. Dari PKS, salah satu kasus yang menonjol adalah Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS, dalam kasus korupsi impor daging sapi. Sementara dari PKB, Musa Zainuddin, anggota DPR RI dari PKB, terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika dan korupsi dapat terjadi pada semua partai politik, termasuk partai berbasis keagamaan.¹⁹

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi partai dan bersifat terbuka dengan menerima anggota dari berbagai agama, suku, ras, dan golongan. Sikap keterbukaan tersebut tercermin dalam visi, misi, program perjuangan, struktur keanggotaan, dan pola kepemimpinan partai. Seiring perkembangannya, PKB mengalami transformasi politik dan kelembagaan dengan menempatkan kepentingan kelompok masyarakat marginal sebagai salah satu fokus perjuangan partai. Imam Nahrawi menjelaskan bahwa PKB menolak orientasi politik yang hanya berfokus pada perebutan kekuasaan karena dapat memunculkan intrik politik tanpa dasar moral dan merugikan perjuangan partai. Oleh karena itu, PKB menempatkan moralitas politik sebagai prioritas, terutama di tengah praktik politik yang cenderung pragmatis. Namun demikian, menurunnya moralitas dalam praktik politik secara umum menjadi tantangan bagi

¹⁸ Lilis Sariyanti Yeni Sri Lestari, Devi Intan Chadijah, "Korupsi Politik Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnallus Civilie (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 8, no. 1 (2024): 12–26.

¹⁹ Tanto Lailam Mukhtar, "Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan, Peradilan Etika Yang Independen Dan Imparsial," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): Hal 266.

PKB untuk tetap menjaga dan mempertahankan komitmen etika politiknya secara konsisten.²⁰

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang bahwa moralitas dan kekuasaan dapat disatukan apabila berlandaskan ideologi Islam. Sejak awal berdirinya, PKS dibentuk sebagai partai yang berjuang secara formal dan legal untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Mashadi Said menjelaskan bahwa PKS sebagai partai Islam menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah bagi umat Islam di Indonesia. PKS juga menegaskan dirinya sebagai partai berideologi Islam yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman secara universal, sehingga aktivitas politiknya diarahkan berdasarkan prinsip moral dan etika Islam.²¹

Ideologi PKS memengaruhi dinamika politik dan pilihan masyarakat dalam pemilu. Sebagian pemilih Islamis memandang PKS bukan hanya sebagai partai politik, tetapi juga sebagai representasi aspirasi umat Islam. Dalam kondisi tersebut, PKS menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan ideologi partai sekaligus memenangkan pemilu. Oleh karena itu, PKS menerapkan pendekatan moderat dan inklusif dengan menyesuaikan diri pada sistem demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan. Di sisi lain, sikap moderat dalam partai juga dipengaruhi pertimbangan pragmatis, yaitu untuk memperluas dukungan politik dan meningkatkan peluang memperoleh kekuasaan. Meskipun demikian, PKS tetap mempertahankan prinsip-prinsip ideologi Islam dalam platform politiknya, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih moderat agar dapat diterima masyarakat yang lebih luas. PKS juga menekankan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola negara. Bagi PKS, ajaran Islam menjadi dasar untuk mewujudkan masyarakat madani sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Karena itu, PKS membangun komunikasi politik

²⁰ Hanif Dhakhiri and Massa Djafar, "Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa The Political Structure of Partai Kebangkitan Bangsa," *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 11, no. 01 (2015): Hal 1602-1609.

²¹ M. Chairil Akbar Yeby Ma'asan Mayrudin, "Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam :," *Jurnal Madani* 11, no. 2 (2019): Hal 175.

dengan masyarakat serta mengutamakan partisipasi kolektif dalam aktivitas politiknya.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai moral dalam ajaran Islam memengaruhi perilaku para politisi Muslim untuk bertindak benar, tidak merugikan orang lain, serta menjaga kehidupan sosial sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Namun, dalam upaya memperoleh kekuasaan dan jabatan politik, para politisi sering dihadapkan pada berbagai strategi dan kepentingan politik. Pada praktiknya, sebagian politisi menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan politik tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya disonansi kognitif, yaitu ketegangan psikologis yang muncul ketika keyakinan moral dan nilai-nilai etis yang dianut tidak selaras dengan tindakan atau keputusan politik yang dilakukan. Akibatnya, tindakan politik yang seharusnya berlandaskan etika dan moral terkadang dilakukan melalui praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip moral yang seharusnya dijunjung tinggi.

Penelitian ini berfokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan politisi Muslim dan moralitas politik dalam upaya meraih kekuasaan, termasuk cara menarik simpati masyarakat. Fokus tersebut didasarkan pada adanya indikasi praktik politik yang tidak ideal, seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan tindakan lainnya yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para politisi Muslim mengenai persoalan tersebut, meskipun praktik-praktik tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah terkait fleksibilitas moral dalam pandangan para politisi Muslim PKS dan PKB di Jawa Barat tahun 2023–2025 dengan menyusun beberapa pertanyaan yang akan digali untuk menghasilkan pembahasan. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

²² Johan Wahyudi, “Pudarnya Ideologi Partai Islam Pascareformasi: Telaah Atas Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sejak Pemilu 2009- 2019,” *Jurnal Pemikiran Politik Islam* 5, no. 1 (2022): Hal 110.

1. Bagaimana profil ideal politisi muslim menurut politisi PKS dan PKB di Jawa Barat?
2. Bagaimana realitas politisi PKS dan PKB jika diukur dengan profil ideal?
3. Mengapa terjadi variasi antara politisi yang ideal dan tidak ideal di PKS dan PKB?
4. Bagaimana pandangan PKS dan PKB terhadap politisi yang tidak ideal?

Definisi operasional dalam penelitian ini menetapkan bahwa politisi Muslim PKS dan PKB di Jawa Barat adalah individu beragama Islam yang aktif dalam struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik sebagai pengurus partai maupun anggota legislatif. Subjek penelitian dibatasi pada pengurus PKS dan PKB di tingkat wilayah atau daerah yang menjabat pada periode 2023–2025, serta anggota legislatif DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota dari kedua partai tersebut pada periode yang sama. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan relevan dengan kondisi politik terkini. Selain itu, pengurus partai dan anggota legislatif dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan politik serta terlibat langsung dalam praktik politik, sehingga dianggap paling relevan untuk mengkaji fleksibilitas moral dalam praktik politik.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui profil politisi Muslim ideal menurut pandangan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Barat;
2. Menjelaskan realitas perilaku para politisi PKS dan PKB dalam praktik politik di lapangan;
3. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya variasi antara politisi ideal dan politisi yang tidak ideal di PKS dan PKB;
4. Menganalisis pandangan para politisi Muslim PKS dan PKB di Jawa Barat mengenai berbagai perilaku politik yang dianggap tidak ideal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik mengenai fleksibilitas moral dalam pandangan para politisi Muslim PKS dan PKB di Jawa Barat sebagai referensi dalam kajian agama dan politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memperkaya kajian pustaka bagi peneliti maupun lembaga akademik dalam bidang Studi Agama-Agama, khususnya konsentrasi Agama dan Politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kajian mengenai moralitas politik, perilaku politisi, serta hubungan antara nilai-nilai agama dan praktik politik dalam konteks demokrasi di Indonesia.

2. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada narasumber, instansi terkait, serta masyarakat umum dalam memahami fleksibilitas moral dalam perilaku politisi Muslim, baik dari partai berbasis agama maupun partai nasionalis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dan para politisi dalam memperkuat etika, integritas, dan tanggung jawab moral dalam praktik politik.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini serta menghubungkan dan menelusuri kajian yang relevan, digunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi, sebagai berikut:

- 1) Ahmad Subki. *Disertasi Agama Dan Perilaku Politik Kiai*. 2020.

Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku politik kiai di Tasikmalaya pasca-reformasi sangat variatif, tergantung pada kecenderungan pemikiran dan pemahaman mereka terhadap agama Islam. Terdapat kiai yang aktif dalam politik secara langsung, ada yang aktif secara tidak langsung,

bahkan ada yang sama sekali tidak terlibat dalam urusan politik. Faktor agama atau keberagamaan sangat memengaruhi perilaku politik para kiai di Tasikmalaya, karena ideologi Islam dijadikan sebagai landasan dalam setiap perilaku, termasuk perilaku politik. Dimensi keyakinan, dimensi praktik, dan dimensi pemahaman agama memengaruhi sebagian besar perilaku politik kiai di Tasikmalaya, sedangkan dimensi pengalaman dan konsekuensi agama tidak terlalu signifikan dalam memengaruhi perilaku politik mereka. Adapun orientasi politik kiai di Tasikmalaya meliputi: (1) aktualisasi ajaran Islam; (2) sebagai sarana dakwah; (3) tanggung jawab dalam membangun tatanan sosial yang maju; (4) membangun kemaslahatan umat; dan (5) pengabdian kepada daerah dan negara.²³

- 2) Burhanuddin Muhtadi di Australian National University dalam buku berjudul *Dilema PKS Suara dan Syariah*. Jakarta: 2012.

Berdasarkan perspektif integrasi gerakan sosial, penelitian Burhanuddin menunjukkan bahwa PKS muncul dari situasi kegaduhan sosial dan politik yang membuka celah dalam struktur kesempatan politik. PKS mampu memanfaatkan struktur kesempatan politik dan sosial melalui mobilisasi sumber daya, termasuk jaringan dan sumber organisasi, dalam rangka mendukung keberlangsungan gerakan. Selain itu, PKS secara sadar memberikan tanggapan atas semakin terbukanya peluang politik serta peningkatan kapasitas organisasi dan infrastruktur untuk memobilisasi kader dengan menggunakan nilai-nilai, kepercayaan, dan gagasan yang dapat diterima secara bersama.²⁴ Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa Islamisme diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur ketertiban sosial. Kaum Islamis berupaya mengganti aturan sosial-politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan pada tafsir tertentu terhadap ajaran Islam. Upaya tersebut dapat

²³ Ahmad Subqi, "Agama Dan Perilaku Politik Kiai (Studi Tentang Perilaku Politik Kiai Di Tasikmalaya Pasca Reformasi)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²⁴ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS Suara Dan Syariah*, ed. Saidirman Ahmad, Cetakan 1 (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012). Hal, 23.

ditempuh melalui aksi atau gerakan, baik secara damai maupun kekerasan, tergantung pada sistem nilai yang diyakini oleh para aktor gerakan Islamis tersebut.²⁵ Dilema PKS sebagai partai politik yang lahir dari rahim gerakan dakwah menunjukkan adanya tarik-menarik dan faksionalisasi antara kubu *harakah* yang menjadi basis sosial PKS dan kubu *hizb* (partai) yang lebih pragmatis dan realistis, yang kemudian mewarnai perubahan strategi elektoral partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Burhanuddin juga menjelaskan bahwa pengaruh aliran politik dan ideologi agama dalam menarik simpati pemilih cenderung mengalami penurunan pada era pemilu pasca-Orde Baru.²⁶

- 3) Andy Dermawan, Tulus Warsito dan Mahli Zainuddin. Artikel *jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: Perilaku Politik Elite Muhammadiyah pada Pilkada (Studi Kasus di Wilayah Kauman, Temanggung, Jawa Tengah)*. 2019. *Asy-Syir'ah* (Vol. 53, No. 1).

Pembahasan penelitian ini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perolehan suara setiap calon bupati yang diusung oleh ormas Muhammadiyah melalui partai PAN di wilayah Kauman, Temanggung. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional, dengan hasil yang menunjukkan bahwa perilaku elit politik Muhammadiyah di Temanggung pada Pilkada tahun 2013 bersifat moderat akomodatif. Perilaku elit Muhammadiyah cenderung mengambil jalan tengah dan menyesuaikan diri dengan dinamika serta realitas perpolitikan di daerah tersebut. Faktor yang memengaruhi masyarakat (responden) dalam memilih salah satu calon bupati, yaitu Anif Punto, didasarkan pada pertimbangan rasional dengan beberapa indikator, seperti janji para calon dan partai, kemampuan calon, tanggung jawab terhadap kinerja, serta visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh calon dan partai.²⁷

- 4) Edy Chrisjanto, Carolus Evan Putra Edginio, dan Hartanto. Artikel *jurnal Majalah Ilmiah: Aspek Moralitas dalam Politik di Indonesia*.

²⁵ Samsu Adabi Mamat Syahrir Karin, "Aktivisme Dan Perilaku Politik Islam: Teori, Pemikiran Dan Gerakan," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013). Hal,129.

²⁶ Muhtadi, *Dilema PKS Suara Dan Syariah*. Hal,30.

²⁷ Tulus Warsito dan Mahli Zainuddin Andy Dermawan, "Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Pada Pilkada : Studi Kasus Di Wilayah Kauman Temanggung Jawa," *Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 1–30.

Pembahasan penelitian ini menjelaskan hubungan antara moralitas dengan proses pemilu yang membentuk perilaku politisi. Saat pemilu berlangsung, banyak politisi yang berusaha menjaga moralitas agar dapat dipilih oleh masyarakat. Namun, realitas politik di lapangan sering kali tidak sejalan, ditandai dengan adanya praktik politik uang serta berbagai persoalan lain yang telah berlangsung sejak lama, termasuk dalam dinamika kelembagaan seperti DPR/DPRD yang pada masa tertentu tidak memiliki batas masa jabatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku saling menjatuhkan antar calon telah membudaya dan mewarnai dunia perpolitikan, terutama pada masa pemilu. Padahal, politik sebagai pilar demokrasi yang menghasilkan pemimpin bangsa menuntut adanya pendidikan moral, guna menciptakan iklim politik dan sistem pemerintahan yang baik.²⁸

- 5) Muchson AR. Artikel jurnal *Civics* “Dimensi Moral Dalam Kekuasaan Politik”.1 (2004): 130-140.

Penjelasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika politik dalam sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila menekankan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari amanat rakyat sebagai prinsip demokrasi. Meskipun demikian, tanggung jawab moral dari kekuasaan harus tetap dihargai dan dijunjung tinggi. Pandangan bahwa kekuasaan merupakan legitimasi moral atau personifikasi kebaikan moral harus ditolak. Persoalan moral penguasa dan tanggung jawab moral kekuasaan sebagai bagian penting dari etika politik perlu diapresiasi dalam sistem demokrasi Pancasila. Kekuasaan tidak hanya dipandang sebagai persoalan konstitusional, tetapi juga sebagai persoalan moral. Dengan kata lain, selain sah secara konstitusional, kekuasaan juga harus memiliki legitimasi moral. Tidak jarang, seorang penguasa tetap bertahan dengan kekuasaan yang sah secara konstitusional, namun sesungguhnya sudah tidak layak secara moral.²⁹

²⁸ Edy Chrisjanto and Carolus Evan Putra Edginio, “Aspek Moralitas Dalam Politik Di Indonesia” 19 (2025): 531–47.

²⁹ Muchson AR, “Dimensi Moral Dalam Kekuasaan Politik,” *Civis* 1, no. 2 (2004): 130–40.

- 6) Ethan Poskanzer Ezra W. Zuckerman Sivan, Minjae Kim, dan Oliver Hahl. Artikel *American Sociological Review* “Ketika Kebenaran Mengalahkan Fakta: Studi tentang Fleksibilitas Moral Partisipan dalam Politik Amerika,” 40 (2023): 71–89.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa studi yang dilakukan terhadap pemilih Amerika selama dan setelah pemerintahan Trump menunjukkan bagaimana pemilih dari kedua partai memberikan justifikasi moral secara eksplisit terhadap pernyataan politisi yang secara terang-terangan melanggar norma pembuktian fakta. Justifikasi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kecenderungan pemilih untuk salah mengira misi informasi sebagai fakta menjadi pendorong respons positif mereka terhadap informasi partisan. Studi-studi tersebut memberikan bukti yang konsisten tentang fleksibilitas faktual, sekaligus menunjukkan adanya fleksibilitas moral, di mana pemilih membenarkan pengabaian fakta secara demagogis sebagai cara efektif untuk menyampaikan “kebenaran” politik yang dianggap relevan. Implikasi utamanya adalah bahwa misi informasi politik tidak dapat sepenuhnya diatasi hanya dengan mendorong pemilih untuk membedakan antara fakta dan fiksi, karena orientasi moral pemilih dapat membuat mereka lebih menerima pengabaian fakta. Secara lebih luas, temuan ini berkaitan dengan peran norma-norma demokrasi dalam sistem demokrasi liberal serta hubungan antara orientasi moral dan kepentingan yang dipersepsikan.³⁰

- 7) Gunawan Undang, Husni Thamrin. Artikel Jurnal Ilmiah Keislaman *Konflik dan Integrasi Islam Politik*. 2016. *Al-Fikra* (Vol. 15, No. 2).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur utama yang memperparah konflik internal dan menurunkan integrasi adalah solidaritas kelompok serta perebutan kekuasaan yang dipicu oleh struktur kekuasaan. Hal tersebut dapat memicu konflik dan menurunkan solidaritas subjektif dalam kelompok, sehingga solidaritas yang bersifat konfliktual dapat menghambat perbedaan. Tujuan dari solidaritas sendiri merupakan unsur utama untuk mengendalikan

³⁰ Chrisjanto and Edginio, “Aspek Moralitas Dalam Politik Di Indonesia.”

konflik, meningkatkan integrasi, mengembangkan konsensus, memperkuat kerja kelompok, serta menjadi syarat dalam membangun saling ketergantungan dengan kelompok eksternal. Partai politik Islam secara umum dapat mengalami perubahan dari politik rasional ke politik tekstual, serta dari konsep kultural partai politik Islam yang digagas oleh intelektual Islam pada masa Orde Baru, sehingga gerakan partai politik Islam lebih condong ke arah model politik Islam profetik.³¹

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, dapat diketahui bahwa tindakan moral yang dilakukan oleh politisi Muslim, umat beragama, lembaga-lembaga keagamaan, serta partai-partai berbasis agama memiliki peran dalam upaya menaungi dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga tercermin dalam perilaku moral yang mereka tampilkan ketika berperan sebagai aktor politik dalam sistem pemerintahan. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dilema moral yang dihadapi oleh para politisi Muslim dalam praktik pemerintahan, terutama ketika mereka harus menyeimbangkan antara nilai-nilai moral keagamaan dengan tuntutan realitas politik.

Penelitian-penelitian di atas memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penulisan ini. Persamaannya terletak pada temuan mengenai adanya fleksibilitas moral yang dimiliki oleh para politisi Muslim, serta adanya pilihan rasional yang harus diambil antara mempertahankan nilai moral ideal dan keputusan strategis yang berkaitan dengan upaya memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang secara khusus menelaah fleksibilitas moral dalam perspektif politisi Muslim yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji cara menghadapi berbagai tekanan situasional dan dinamika politik yang dapat memengaruhi konsistensi moral para politisi dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut sering kali mendorong para politisi Muslim untuk menempatkan

³¹ Gunawan Undang et al., "Konflik Dan Integrasi Islam Politik," *Ilmiah Keislaman* 15, no. 2 (2016): 177–231.

nilai-nilai moral ideal pada posisi yang kurang dominan, sehingga tindakan-tindakan politik yang dilakukan cenderung mengesampingkan standar moral tertentu demi membenarkan perilaku yang dianggap strategis dalam kompetisi politik. Para politisi kemudian memandang tindakan tersebut sebagai langkah untuk menarik dukungan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan persaingan dengan politisi dari kelompok nasionalis dalam arena politik.

Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek kajian, yaitu partai politik dan elite politik yang memberikan pandangan tentang perilaku moral politisi berdasarkan tindakan politik, latar belakang psikologi moral, serta mekanisme pelepasan moral dalam diri politisi. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana politisi mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang menekan nilai moral, terutama pada masa pemilihan umum yang penuh persaingan politik. Dalam konteks fleksibilitas moral, politisi dapat menunjukkan berbagai sikap, mulai dari menaati norma moral karena tuntutan situasi hingga membenarkan tindakan yang menyimpang dari nilai moral melalui proses rasionalisasi. Rasionalisasi tersebut menjadi mekanisme psikologis untuk mengurangi ketegangan batin ketika politisi menghadapi tekanan politik. Karena itu, dalam situasi politik tertentu, politisi sering dituntut mengambil keputusan secara cepat dan efektif, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan prinsip moral yang ideal.

F. Kerangka Berpikir

Politisi Muslim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membawa nilai-nilai moral dan keagamaan sebagai bagian dari identitas politik mereka. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam perilaku politik, baik dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi, maupun dalam menjalankan kekuasaan di pemerintahan. Namun, dalam praktik politik, para politisi menghadapi berbagai tekanan, seperti kepentingan partai, tuntutan konstituen, kebutuhan kompromi politik, dan persaingan kekuasaan. Kondisi ini

sering menimbulkan disonansi kognitif, sehingga terjadi ketegangan antara nilai moral pribadi dan tindakan politik yang harus dilakukan.³²

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan demokrasi, penyelenggara negara dituntut untuk bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab. Karena itu, moral menjadi landasan penting dalam praktik politik, terutama untuk menjaga integritas dan etika politik. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa moral politik berkaitan dengan legitimasi penggunaan kekuasaan dan tanggung jawab etis dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan ini, politisi Muslim memiliki kewajiban untuk menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab dan memberikan dasar moral atas kekuasaan yang dijalankan. Wewenang politik memiliki dimensi subjektif karena bergantung pada pengakuan masyarakat, sedangkan kekuasaan lebih berkaitan dengan sumber daya nyata yang digunakan dalam praktik politik.³³

Tindakan politisi pada dasarnya bersifat instrumental, yaitu berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Max Weber menyebut tindakan ini sebagai rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan cara paling efektif untuk mencapai tujuan.³⁴ Dalam politik, rasionalitas ini terlihat ketika politisi menggunakan berbagai strategi untuk memperoleh dukungan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam praktiknya, cara-cara yang kurang etis sering kali dianggap wajar selama dinilai efektif untuk mencapai tujuan politik. Akibatnya, kepentingan moral sering ditempatkan di bawah kepentingan strategis dan kekuasaan. Kondisi tersebut dapat melahirkan praktik politik seperti intimidasi, delegitimasi lawan politik, dan manipulasi informasi demi memperoleh keuntungan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindakan politik sering didasarkan pada pertimbangan efektivitas untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, hubungan antara tujuan dan cara dalam

³² Dian Eka Alim, Ashari Sakti, Sahmawati, "Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang)," *Noken* 7, no. 1 (2021): 30–43. Hal,32.

³³ Nashiva Aulia Prastiwi Nurmayani, Annisa Zulyani Parinduri, Sarah Aulia, Salsabila, "Implementasi Nilai-Nilai Politik Islam Dalam Demokrasi Pancasila," *Media Akademik* 3, no. 10 (2025). Hal,6.

³⁴ Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD," *Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 137–52.

politik menjadi bersifat instrumental, sehingga nilai moral sering kali bergantung pada kepentingan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan politik tersebut.³⁵

Ketika politisi menghadapi pertentangan antara nilai moral yang diyakini dengan tuntutan tindakan politik, dapat muncul kondisi yang disebut disonansi kognitif. Kondisi ini menimbulkan ketegangan psikologis yang mendorong individu untuk mengurangi ketidaknyamanan melalui berbagai cara, seperti mencari pembenaran, menyesuaikan penilaian moral, atau mengubah perilaku.³⁶

Leon Festinger menjelaskan bahwa disonansi kognitif terjadi ketika tindakan seseorang tidak sesuai dengan nilai, keyakinan, atau prinsip moral yang dianutnya. Dalam konteks politik, kondisi ini sering muncul karena politisi harus mengambil keputusan secara cepat di tengah persaingan kekuasaan. Akibatnya, pertimbangan moral dan sosial sering kali menjadi terbatas, sementara tindakan politik lebih diarahkan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Kondisi tersebut dapat terlihat dalam praktik manipulasi politik, seperti penggunaan doktrin atau simbol keagamaan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Narasi politik yang dibangun biasanya menekankan kesamaan identitas agama sebagai dasar dukungan politik. Narasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi, seperti khutbah, kampanye politik, dan komunikasi politik tertutup. Dalam situasi ini, aspek kognitif individu, seperti keyakinan, cara memahami situasi, dan penilaian terhadap diri sendiri, berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku politik seorang politisi.³⁷

Namun, ketegangan tersebut sering diatasi melalui mekanisme *moral disengagement* atau pelepasan moral. Albert Bandura menjelaskan bahwa pelepasan moral adalah cara seseorang membenarkan tindakannya agar tetap dianggap benar secara moral. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk dari dirinya. Albert Bandura

³⁵ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, Cetakan ke (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018).

³⁶ Michael Rush dan Philip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, ed. Terjemahan. Kartini Kartono (Pt Rajagrafindo Persada, 1993). Hal, 129.

³⁷ Leon Festinger, "A Theory Of Social Comparison Processes," *Human Relations* 7 (1954): 117–40. Hal, 117.

menjelaskan delapan mekanisme pelepasan moral. Pertama, *moral justification* (pembenaran moral), yaitu ketika perilaku yang salah dianggap benar karena dinilai memiliki tujuan moral atau sosia.³⁸ Kedua, *euphemistic labeling* (penghalusan bahasa), yaitu penggunaan istilah yang lebih halus agar suatu tindakan tidak terlihat terlalu buruk.³⁹

Ketiga, *advantageous comparison* (perbandingan yang menguntungkan), yaitu membandingkan tindakan yang dilakukan dengan tindakan lain yang lebih buruk agar perilaku tersebut tampak lebih ringan dan dapat diterima.⁴⁰ Keempat, *displacement of responsibility* (pengalihan tanggung jawab), yaitu ketika seseorang melepaskan tanggung jawab atas tindakannya dengan menyalahkan pihak lain atau situasi tertentu.⁴¹ Akibatnya, pelaku merasa bahwa kesalahan tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab dirinya.⁴²

Kelima, *disregard or distortion of consequences* (pengabaian atau distorsi konsekuensi), yaitu ketika seseorang mengabaikan, mengecilkan, atau memutarbalikkan dampak dari tindakannya agar tidak merasa bersalah atas kerugian yang ditimbulkan,⁴³ sehingga individu cenderung menghindari atau mengecilkan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.⁴⁴ Keenam, *dehumanization* (dehumanisasi), cara pandang yang menganggap individu atau kelompok lain tidak memiliki nilai kemanusiaan secara utuh, sehingga martabat, perasaan, dan hak-haknya diabaikan.⁴⁵

Ketujuh, *power of humanization* (kekuatan humanisasi), yaitu upaya untuk memulihkan dan menegaskan kembali nilai kemanusiaan seseorang atau

³⁸ Albert Bandura, "Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities," *Personality and Social Psychology Review* 3, no. 3 (1999): 193–209. Hal,194.

³⁹ Bandura. Hal,195.

⁴⁰ Annida Husna Pohan, "Hubungan Antara Self Control Dan Moral Disengagement Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa SMKS Kesehatan Pro Skill Indonesia," UIN Suska Riau, 2025. Hal,33.

⁴¹ Yulia Ayriza Siregar, Rina Rahayu, "Moral Disengagement Sebagai Prediktor Terhadap Perilaku Agresif Remaja," *Ecopsy* 7, no. April (2020): 7–13. Hal, 9.

⁴² Bandura, "Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities." Hal,197.

⁴³ Eva Septiana, Ishaq Mahmudil Hakim, and Kata Kunci, "Identitas Moral Sebagai Moderator Pengaruh Antara Moral Disengagement Dengan Kecurangan," *Psikogenesis* 9, no. 2 (2021): 116–31. Hal,123.

⁴⁴ Bandura, "Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities." Hal,199.

⁴⁵ Bandura. Hal,200.

kelompok, terutama ketika mereka diperlakukan tidak manusiawi.⁴⁶ Albert Bandura menjelaskan bahwa individu yang masih memandang orang lain sebagai manusia secara utuh cenderung lebih sulit melakukan tindakan yang merugikan atau memberikan hukuman secara berlebihan.⁴⁷ Kedelapan, *attribution of blame* (atribusi kesalahan), yaitu kecenderungan menyalahkan orang lain atau situasi tertentu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.⁴⁸ Dalam kondisi ini, individu memandang dirinya sebagai pihak yang terpaksa melakukan tindakan merugikan karena adanya tekanan, paksaan, atau provokasi dari pihak lain.⁴⁹

Teori *applied morality* dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Daniel M. Bartels. Daniel M. Bartels menjelaskan bahwa fleksibilitas moral muncul melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, penilaian moral dibentuk oleh intuisi dan penalaran. Intuisi merupakan respons cepat yang bersifat emosional, sedangkan penalaran merupakan proses berpikir yang lebih sadar dan rasional. Kedua, konteks atau situasi tertentu memengaruhi cara seseorang menilai apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Ketiga, individu mempertimbangkan aturan moral yang melarang tindakan merugikan orang lain, sekaligus menghitung manfaat dan kerugian dari setiap pilihan yang tersedia. Daniel M. Bartels menunjukkan bahwa ketiga mekanisme tersebut bekerja secara bersamaan, sehingga penilaian moral menjadi sangat dipengaruhi oleh konteks yang dihadapi. Dengan demikian, penilaian moral tidak bersifat sederhana atau tunggal, tetapi merupakan gabungan dari proses emosional, rasional, dan situasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu teori moral saja, baik yang bersifat normatif maupun deskriptif, belum tentu mampu menjelaskan seluruh proses penilaian moral secara utuh. Lebih lanjut, Daniel M. Bartels menjelaskan bahwa penilaian moral dipengaruhi oleh tingkat penerimaan seseorang terhadap aturan moral yang melarang tindakan merugikan, jenis dilema

⁴⁶ Meiskyarti Luma, Novianty Djafri, and Universitas Negeri Gorontalo, "Urgensi Nilai Sosial Dan Budaya Masyarakat Dalam Pendidikan Di Era Society 5.0," *Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 9–16. Hal,9.

⁴⁷ Bandura, "Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities." Hal, 202

⁴⁸ Adang Hambali and Deden Sudirman, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Moral Disengagement Siswa SMA Di Provinsi Jawa Barat," *Ilmiah Psikologi* 6, no. 2 (2019): 145–56. Hal,147.

⁴⁹ Bandura, "Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities." Hal, 203.

yang dihadapi, serta cara berpikir yang digunakan. Di situasi tertentu, seseorang dapat lebih menekankan pada ketaatan terhadap aturan moral, sedangkan pada situasi lain lebih mempertimbangkan dampak atau konsekuensi dari suatu tindakan. Selain itu, penilaian moral juga dipengaruhi oleh kecenderungan individu dalam menggunakan intuisi atau penalaran.⁵⁰

Dalam konteks kebijakan, seseorang dapat mendukung keputusan yang bertujuan mengurangi kerugian secara keseluruhan, meskipun keputusan tersebut mengorbankan sebagian sumber daya. Sebaliknya, seseorang juga dapat memilih untuk tidak bertindak, walaupun pilihan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Ketika pilihan tersebut dinilai secara terpisah, persetujuan terhadap tindakan yang merugikan biasanya dipengaruhi oleh aturan moral dan cara berpikir individu. Namun, ketika kedua pilihan dibandingkan secara langsung, pertimbangan yang lebih dominan adalah besarnya kerugian yang dihasilkan, bukan perbedaan antara melakukan tindakan yang merugikan atau membiarkan kerugian terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan moral tetap memiliki peran penting, tetapi pengaruhnya bergantung pada situasi yang dihadapi. Dalam kondisi tertentu, pertimbangan emosional terhadap pelanggaran moral dapat dikalahkan oleh perhitungan rasional mengenai manfaat dan kerugian dari suatu tindakan.⁵¹

Berdasarkan temuan di lapangan dan pandangan para politisi, dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas moral digunakan sebagai strategi untuk memperoleh dukungan politik. Moral politisi PKS dan PKB tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Dalam kondisi tertentu, terutama saat berada di bawah tekanan politik, mereka dapat melakukan tindakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai moral Islam. Situasi ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara tindakan dan nilai moral yang diyakini, sehingga muncul disonansi kognitif. Setelah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan moral, individu cenderung melakukan pembenaran melalui mekanisme *moral disengagement* sebagaimana dijelaskan oleh Albert Bandura.

⁵⁰ Daniel M Bartels, "Principled Moral Sentiment and the Flexibility of Moral Judgment and Decision Making," *Elsevier* 108 (2008): 381–417. Hal, 408

⁵¹ Bartels. Hal, 409.

Mekanisme ini membuat seseorang dapat membenarkan tindakannya agar tetap merasa benar secara moral. Di sisi lain, individu tetap memiliki standar moral pribadi yang digunakan untuk menilai dirinya sendiri, yang disebut *self-censure* atau penilaian diri berdasarkan moral. Namun, pada *moral disengagement*, hubungan antara rasa bersalah dan *self-censure* menjadi lemah atau terputus. Akibatnya, individu dapat mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab moral atas tindakannya. James R. Detert menjelaskan bahwa kondisi ini dapat mendorong perilaku tidak etis, seperti kecurangan, terutama dalam lingkungan organisasi. Jika terjadi terus-menerus, pelepasan moral ini dapat memengaruhi pola perilaku individu dalam sistem politik.⁵²

Kerangka teori *moral disengagement* yang dikembangkan oleh Albert Bandura, individu dapat mengalihkan, merasionalisasi, atau menyederhanakan tanggung jawab moralnya melalui mekanisme psikologis tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan standar moral yang biasanya dianut. Bandura menjelaskan bahwa mekanisme ini bekerja dengan cara melemahkan kontrol moral internal melalui proses rasionalisasi kognitif serta pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain atau situasi eksternal.

Dalam konteks penelitian mengenai fleksibilitas moral pada politisi Muslim di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Barat, konsep *moral disengagement* digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral yang berbasis pada ajaran agama dapat mengalami penyesuaian ketika berhadapan dengan tekanan politik, pragmatisme partai, serta tuntutan konstituen. Dengan demikian, tindakan politik tidak selalu sepenuhnya konsisten dengan prinsip moral ideal, melainkan dapat mengalami fleksibilitas sesuai konteks yang dihadapi. Pada praktiknya, seorang politisi dapat menunjukkan perubahan sikap atau keputusan moral yang bersifat situasional, tergantung pada dinamika politik, tekanan internal partai, tingkat elektabilitas, maupun tujuan-tujuan pragmatis lainnya. Kondisi tersebut, norma moral agama maupun politik dapat ditafsirkan ulang atau bahkan dikompromikan untuk

⁵² Septiana, Hakim, and Kunci, "Identitas Moral Sebagai Moderator Pengaruh Antara Moral Disengagement Dengan Kecurangan." Hal,119.

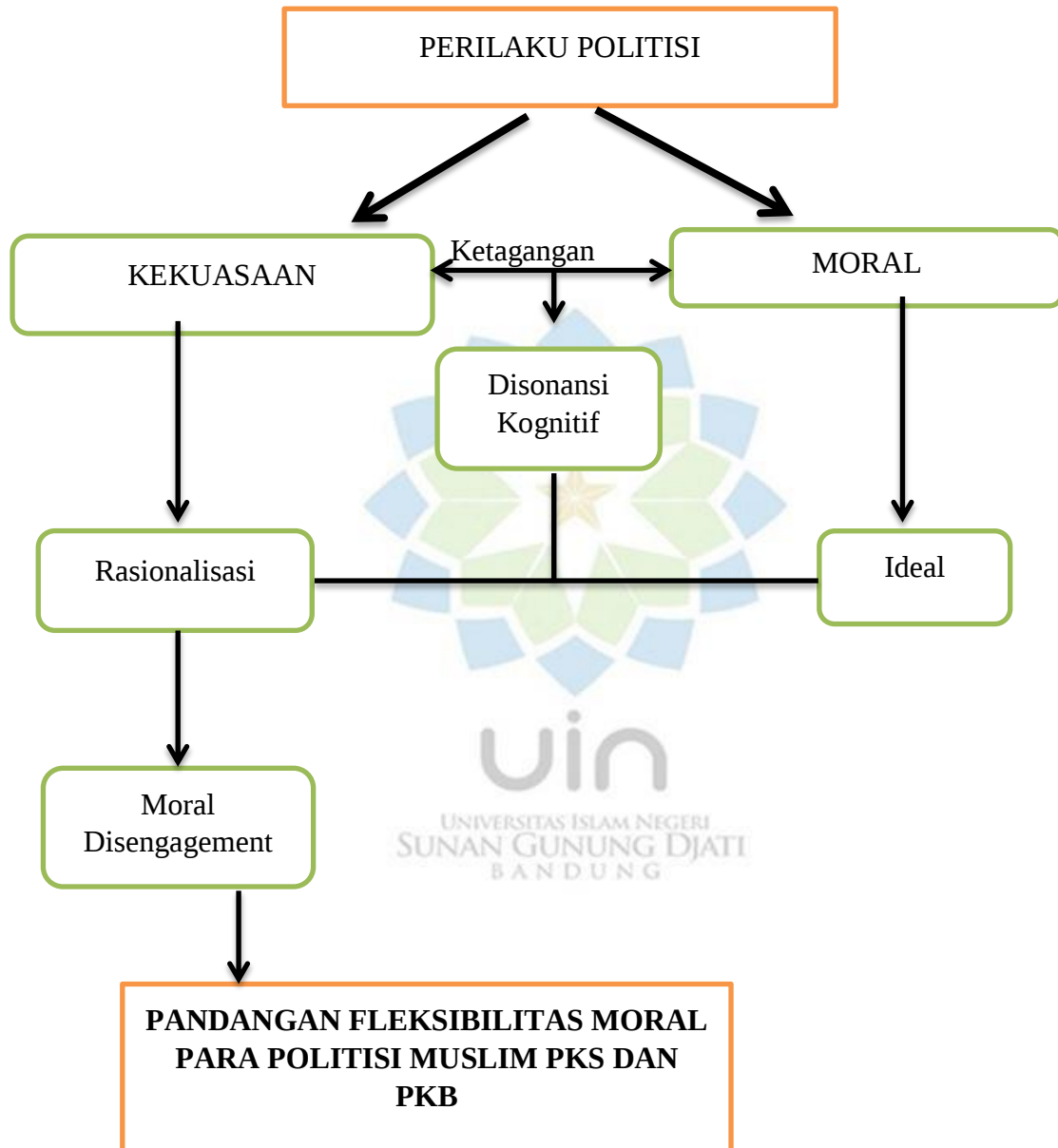
mencapai tujuan tertentu, tanpa selalu disertai rasa bersalah secara psikologis. Kerangka ini menjadi relevan terutama ketika politisi dihadapkan pada dilema antara konsistensi prinsip moral dan tuntutan politik praktis, antara idealitas nilai dan kepentingan elektoral maupun sektoral.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan politisi Muslim PKS dan PKB mengenai perilaku politik dari sudut pandang psikologi sosial, khususnya terkait disonansi kognitif dan mekanisme moral dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana fleksibilitas moral terbentuk dari pandangan individu dan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan politik yang mereka hadapi.



G. Skema Kerangka Berpikir

**FLEKSIBILITAS MORAL DALAM PANDANGAN PARA
POLITISI MUSLIM PKS DAN PKB DI JAWA BARAT**



Gambar skema di atas menjelaskan “Perilaku Politisi”, yaitu seluruh tindakan, keputusan, dan strategi yang dilakukan oleh politisi (baik dari Partai Keadilan Sejahtera maupun Partai Kebangkitan Bangsa), di mana perilaku tersebut dipengaruhi oleh dua hal besar, yaitu kekuasaan dan moral. Kekuasaan

berkaitan dengan ambisi untuk menang, strategi politik, dan kepentingan pragmatis. Hal ini kemudian memunculkan rasionalisasi, yaitu ketika politisi mulai mencari pembenaran atas tindakan yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai moral. Proses ini berlanjut pada *moral disengagement*, yaitu kondisi ketika seseorang “menjauh” dari standar moralnya atau menormalkan tindakan yang sebenarnya bermasalah. Sementara itu, moral memiliki sisi ideal yang bersumber dari nilai agama, etika, serta prinsip benar dan salah, yang secara ideal menjadi pedoman bagi politisi dalam bertindak.

Dari kedua kutub utama, yaitu kekuasaan dan moral, muncul titik konflik atau ketegangan, di mana tuntutan untuk menang (kekuasaan) sering berbenturan dengan prinsip moral. Ketegangan ini kemudian memunculkan disonansi kognitif, yaitu adanya konflik dalam pikiran antara “apa yang diyakini benar” dan “apa yang dilakukan”. Disonansi kognitif ini menjadi jembatan antara idealitas moral dan rasionalisasi kekuasaan, yang kemudian melahirkan proses negosiasi dalam diri politisi. Hasil dari proses tersebut adalah terbentuknya fleksibilitas moral, di mana moral para politisi Muslim tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dilonggarkan, disesuaikan, atau dinegosiasikan sesuai dengan situasi politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politisi berada di antara tekanan kekuasaan dan tuntutan moral yang melahirkan konflik batin (disonansi), mendorong terjadinya rasionalisasi serta sebagian bentuk pelepasan moral, hingga akhirnya membentuk fleksibilitas moral dalam praktik politik.